

**ANALISIS EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

Zamroni Rahmat, Muhamad Suhardi

Administrasi Pendidikan, FIPP Universitas Pendidikan Mandalika
e-mail: zamronirahmat46@gmail.com, muhamadsuhardi@undikma.ac.id

ABSTRAK

Sebagai negara berkembang, Indonesia berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun yang berkualitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah melalui alokasi anggaran BOS mendukung perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, Mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya jumlah, kualitas, dan kesejahteraan pendidik, prasarana dan sarana belajar yang belum optimal, pendanaan yang tidak mencukupi, serta proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui evaluasi terhadap penggunaan dana BOS di sekolah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah serta staf administrasi. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi dan akuntabilitas memiliki peranan penting dalam mendorong transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan efisiensi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS agar tercapai pengelolaan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: *Efisiensi, Akuntabilitas, Dana Bantuan Operasional Sekolah.*

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia is trying to improve the quality of education by implementing the School Operational Assistance Program (BOS) to support a quality 12-year compulsory education program, as regulated in Law Number 20 of 2003. To improve the quality of education, the government through the BOS budget allocation supports the improvement of educational facilities and infrastructure. However, the quality of education in Indonesia still faces challenges, such as the lack of number, quality, and welfare of educators, suboptimal learning infrastructure and facilities, insufficient funding, and learning processes that are not yet efficient and effective. This study aims to analyze the efficiency and accountability in the utilization of School Operational Assistance (BOS) funds at SMK Negeri 1 Lingsar, located in Lingsar District, West Lombok Regency. The primary focus of this research is to support the improvement of financial reporting quality through an evaluation of BOS fund usage at the school. This study employs a qualitative method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation involving the principal and administrative staff. The collected data were analyzed thematically to identify patterns and themes related to the efficiency and accountability in the use of BOS funds. The results indicate that efficiency and accountability play a crucial role in enhancing transparency and

responsibility in financial management. These findings highlight the need to improve efficiency and accountability in the use of BOS funds to achieve better and more accountable financial practices within the educational environment.

Keywords: *Efficiency, Accountability, School Operational Assistance Program (BOS)*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa seluruh warga negara berusia 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyelenggarakan program wajib belajar tingkat dasar secara gratis. Sementara itu, ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan program wajib belajar merupakan tanggung jawab negara dan dilaksanakan melalui lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat. Salah satu kebijakan strategis di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan berdampak langsung bagi masyarakat adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini bertujuan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang berkualitas.

Oleh karena itu, pendidikan, baik formal maupun nonformal, menjadi kebutuhan penting bagi setiap individu. Pendidikan formal meliputi jenjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga pendidikan tinggi (program S1, S2, dan S3). Namun, mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan analisis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), terdapat beberapa faktor yang secara signifikan memengaruhi peningkatan mutu pendidikan, antara lain ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai dari segi jumlah, kualitas, dan kesejahteraan; prasarana dan sarana belajar yang belum optimal; pendanaan pendidikan yang belum mencukupi; serta proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif (Renstra Depdiknas, 2005).

Agar proses belajar-mengajar di sekolah dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Namun, kondisi fasilitas di SMKN 1 Lingsar masih belum memenuhi standar dan memerlukan perbaikan segera. Untuk memperbaikinya tentu diperlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dana guna melengkapi fasilitas pendidikan, salah satunya melalui alokasi anggaran BOS.

Program BOS yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005 telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Sejak tahun 2009, pemerintah mengubah fokus dan pendekatan program BOS, dari sekadar memperluas akses pendidikan menjadi meningkatkan kualitasnya. Kemudian, pada tahun 2011, terjadi perubahan dalam mekanisme penyaluran dana BOS, yang sebelumnya berasal langsung dari APBN menjadi bagian dari dana perimbangan yang ditransfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya serta hasil observasi yang dilakukan di SMKN 1 Lingsar, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian terkait penggunaan dana operasional sekolah. Hal-hal tersebut meliputi: bagaimana efisiensi memengaruhi laporan penggunaan dana operasional sekolah di SMKN 1 Lingsar; bagaimana

cara meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana operasional sekolah; serta bagaimana implementasi penggunaan dana operasional sekolah di SMKN 1 Lingsar.

Efisiensi merupakan upaya mengelola sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, peralatan, dan proses secara efektif untuk mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Dalam konteks yang lebih luas, efisiensi mencerminkan pencapaian prestasi optimal menggunakan sumber daya yang tersedia dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengganggu keseimbangan antara tujuan, alat, tenaga, dan waktu. Efisiensi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu hasil dan usaha. Suatu kegiatan dianggap efisien jika menghasilkan output maksimal baik dari segi mutu maupun jumlah, atau jika hasil tertentu dapat dicapai dengan usaha minimal, termasuk dalam hal pikiran, tenaga, ruang, waktu, dan dana. Menurut Ghiselli & Brown, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Syamsi, efisiensi adalah perbandingan antara input dan output; perusahaan yang efisien tidak membuang sumber daya, sedangkan ketidakefisienan terjadi ketika penggunaan sumber daya melebihi kebutuhan (Syamsi, 2010).

Akuntabilitas berasal dari kata *account* yang berarti laporan atau catatan, dan *ability* yang berarti kemampuan. Secara umum, akuntabilitas dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban. Sebuah organisasi yang memiliki akuntabilitas adalah organisasi yang dapat menyampaikan informasi secara transparan terkait keputusan-keputusan yang telah dibuat, memberi kesempatan bagi pihak eksternal untuk meninjau informasi tersebut, dan bersedia mengambil tindakan yang inovatif jika diperlukan (Victoria, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan kualitas kelengkapan fasilitas sekolah di SMKN 1 Lingsar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam penggunaan dana BOS di sekolah tersebut, serta menilai sejauh mana akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMKN 1 Lingsar. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, memperluas wawasan terkait akuntabilitas penggunaan dana BOS di SMKN 1 Lingsar, serta sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi pendidikan. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Mandalika. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru, siswa, dan kepala sekolah mengenai pemanfaatan dana BOS dalam menunjang pembelajaran dan fasilitas sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peningkatan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS, serta memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai kondisi fasilitas pendidikan di SMKN 1 Lingsar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah serta staf administrasi. Fokus penelitian ini adalah analisis efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana operasional sekolah di SMKN 1 Lingsar, yang mencakup tiga aspek utama: pertama, bagaimana efisiensi memengaruhi laporan penggunaan dana operasional sekolah; kedua, bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana operasional sekolah; dan ketiga, bagaimana implementasi penggunaan dana operasional sekolah di SMKN 1 Lingsar. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan mulai dari tanggal 17 Juni sampai dengan 27 Juli di SMK Negeri 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Wawancara dilakukan dengan Ibu Harlistiani, S.Adm selaku bendahara dan Bapak Drs. H. Ahmad Taufiq Gufran, M.M selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar.

Menurut Denzin & Lincoln (dalam Anggito & Setiawan, 2018), penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami untuk memahami makna fenomena yang terjadi dan melibatkan berbagai metode. Erickson (dalam Anggito & Setiawan, 2018) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah mengungkap dan mendeskripsikan aktivitas individu serta dampaknya terhadap kehidupan mereka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas data, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen resmi, bukan kuantitas. Selain itu, penelitian kualitatif lebih fokus pada proses daripada hasil yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara SMKN 1 Lingsar. Sementara data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan dalam bentuk dokumen, seperti dokumen penggunaan keuangan di SMKN 1 Lingsar.

Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah dan Bendahara SMKN 1 Lingsar untuk memperoleh informasi mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas dan kondisi yang relevan dengan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana operasional sekolah. Dokumentasi berupa foto, gambar, dan arsip kegiatan sekolah mendukung validitas data yang dikumpulkan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif, yang terdiri dari empat tahap: pertama, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan; kedua, reduksi data dengan merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, dan membuang data yang tidak relevan; ketiga, penyajian data dalam bentuk naratif, bagan, atau diagram untuk memudahkan pemahaman; dan terakhir, penarikan kesimpulan sementara yang dapat diverifikasi dan diperbaiki berdasarkan bukti yang dikumpulkan lebih lanjut, hingga mencapai kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini didukung oleh data hasil observasi langsung yang dilakukan selama kurun waktu satu bulan. Untuk memperkuat keabsahan data dari wawancara dan observasi, juga dilakukan penelaahan terhadap dokumen dan arsip terkait penggunaan dana. Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lingsar mengenai efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut.

1. Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola sumber daya keuangan, proses kerja, bahan, tenaga, peralatan, serta biaya secara optimal. Efisiensi juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh hasil atau manfaat tertentu dengan pengorbanan seminimal mungkin. Berdasarkan hasil wawancara senin 26 Juli 2024 kepada Bapak Drs. H. Ahmad Taufiq Gufran, M.M selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar dalam pembahasan mengenai Efisiensi di SMK Negeri 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

“Efisiensi di sekolah SMK N 1 Lingsar belum optimal. Saat ini, hanya bendahara dan operator sekolah yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Oleh karena itu saya sebagai kepala sekolah memilih orang yang memang mampu untuk mengelola keuangan dengan baik dan bisa mengoperasikan komputer yang ditugaskan menjadi bendahara”.

Salah satu komponen utama dalam menciptakan efisiensi adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang keahliannya. Tingkat pengetahuan yang dimiliki karyawan berperan besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Karyawan dengan pengetahuan yang memadai cenderung mampu meningkatkan efisiensi organisasi. Sebaliknya, karyawan yang kurang memahami tugasnya akan mengalami kesulitan dalam bekerja dan tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara senin 27 Juli 2024 kepada Ibu Harlistiani, S.Adm selaku bendahara dalam pembahasan mengenai pemahaman, tugas pokok, fungsi dan pemahaman tentang siklus akuntansi dalam penyusunan penggunaan keuangan yang merupakan komponen utama dalam Efisiensi di Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

“Sebagai penanggung jawab dan pengelola keuangan tentu memahami tugas dan fungsi merupakan hal yang wajib yang perlu kami ketahui yaitu: mengerjakan administrasi berupa perencanaan penggunaan dana anggaran sebelum dicairkan oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang akan diberikan, mengerjakan administrasi pencatatan disetiap transaksi yang dilakukan setiap pengeluaran dan penggunaan dana, membuat pelaporan keuangan kepada instansi terkait setelah selesai penyusunan dana setaip triwulan, melakukan penyusutan pajak dari semua jenis transaksi yang merupakan objek kena pajak sesuai jenis pajak masing-masing selanjutnya menyeter pajak kedinas pendapatan daerah”.

Dari siklus akuntansi tersebut Ibu Harlistiani, S.Adm selaku bendahara dapat melakukan transaksi keuangan berdasarkan petunjuk teknis yang diberikan oleh pihak instansi pemberian dana tanpa harus didahului keahlian khusus dibidang akuntansi. Akan tetapi, berdasarkan kebutuhan sekolah dan mendapatkan pelatihan pembukuan administrasi secara berkala oleh dinas instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara senin 26 Juli 2024 kepada Bapak Drs.H.Ahmad Taufiq Gufran, M.M selaku kepala sekolah dalam pembahasan mengenai pelatihan terkait penatausahaan penggunaan keuangan dan keahlian dalam melaksanakan tugas menggunakan teknologi yang merupakan komponen kedua dalam Efisiensi di Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

“Pelatihan penatausahaan penggunaan keuangan dilakukan secara berkala, sehingga pihak dari sekolah tetap dapat dan bisa ,mengikutinya. Pelatihan dilakukan oleh instansi terkait dan biasanya diikuti oleh kepala sekolah, bendahara dan operator sekolah”.

Dalam proses penyusunan penggunaan keuangan tentu membutuhkan alat untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, perlu tenaga administrasi sekolah memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya menggunakan teknologi. berdasarkan hasil wawancara Ibu Harlistiani, S.Adm senin 27 Juli 2024 di Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

“Saya selaku pengelola keuangan memiliki tuntutan untuk melakukan kegiatan administasi maka kami berupaya untuk terbiasa mungkin memiliki kemampuan menggunakan teknologi dan biasanya kepala sekolah akan menugaskan kepada guru yang bisa menggunakan teknologi sebagai bendahara”.

Berdasarkan hasil wawancara senin 27 Juli 2024 kepada Ibu Harlistiani, S.Adm selaku bendahara dalam pembahasan mengenai penyusunan penggunaan keuangan yang dilakukan tepat waktu yang merupakan komponen satu dalam efisiensi di sekolah SMK Negeri 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

“Adakalanya melakukan penggunaan keuangan melebihi waktu awal yang ditargetkan akan tetapi berhubungan dengan kebutuhan sekolah maka kami melakukan pelaporan tanpa melewati batas waktu yang ditentukan yaitu secara triwulan maupun catur wulan disetiap tahun anggaran”.

2. Akuntabilitas penggunaan Keuangan

Akuntabilitas penggunaan Keuangan adalah wujud pertanggung jawaban terhadap amanah yang diberikan sebagai respon terhadap tanggung jawab yang telah dipercayakan. Akuntabilitas penggunaan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu lembaga dengan standar akuntansi yang berlaku. Penggunaan keuangan yang akuntabel menunjukkan informasi yang terkandung didalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Kualitas keuangan merupakan penilaian atas output pusat pertanggung jawaban terhadap suatu hal, baik ditinjau dari aspek yang berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan hasil wawancara senin 27 Juli 2024 kepada Ibu Harlistiani, S.Adm selaku bendahara dalam pembahasan mengenai penggunaan keuangan sesuai standar akuntansi dan penyajian penggunaan secara lengkap di Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

“Dinas/instansi terkait memberikan petunjuk teknis disetiap tahun anggaran sehingga sekolah melakukan transaksi sesuai akuntansi yang diterapkan, baik perencanaan berupa ARKAS maupun pembukuan pelaporan. Selain itu, sekolah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ), sehingga dengan adanya LPJ tersebut pemberian dana berikutnya dapat diberikan. LPJ selalu dibuat tepat waktu untuk mengantisipasi keterlambatan pemberian dana berikutnya. LPJ disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan berbagai jenis pembukuan diawali dengan pengisian ARKAS diawal tiap tahun anggaran dan di akhir. LPJ yang dibuat diperiksa oleh petugas dinas yang telah ditentukan dan apabila ada kesalahan harus dikoreksi dan dengan diterimanya LPJ tersebut berarti telah selesai dengan ketentuan yang berlaku”.

Pemerintah juga harus mewujudkan ukuran normatif agar penggunaan keuangan bisa dianggap berkualitas. Ukuran normatif penggunaan keuangan disebut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang terdiri dari relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Penggunaan keuangan merupakan landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah

Penggunaan dana bantuan operasional sekolah adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana Tujuan program wajib belajar. Dimana penggunaan keuangan tersebut sangat baik dalam melakukan pengelolaan terhadap penggunaan keuangan di sekolah SMK Negeri 1 Lingsar tersebut oleh karena itu bendahara mampu menghedel/menyelesaikan laporan pada keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara senin 27 Juli 2024 kepada Ibu Harlistiani, S.Adm selaku bendahara dalam pembahasan mengenai pengawasaan terhadap bantuan operasional sekolah oleh pemerintah sesuai standar akuntansi dan penyajian penggunaan secara lengkap di Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

“dimana setiap pertigabulan itu dalam bantuan operasional sekoah tersebut membuat laporan penggunaan keuangan oleh bendahara untuk jadi bukti kepada pemerintah oleh karena itu kepala sekolah harus teliti terhadap bantuan operasional sekolah sama bendahara.”

Pembahasan

1. Efisiensi

Secara umum, efisiensi dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai hasil seoptimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu bahan, mesin, maupun tenaga manusia, dalam waktu yang sesingkat mungkin. Hal ini dilakukan tanpa mengganggu keseimbangan antara tujuan, alat, tenaga, dan waktu, selama kondisi tersebut masih memungkinkan untuk diubah. Secara lebih spesifik, efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dan usaha yang dilakukan.

Efisiensi memiliki makna yang serupa dengan penjelasan sebelumnya, yakni menggambarkan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Suatu perusahaan dikatakan efisien apabila dapat menjalankan operasionalnya tanpa membuang-buang sumber daya. Sebaliknya, kegiatan dianggap tidak efisien jika penggunaan sumber daya melebihi kebutuhan yang semestinya.

- Efisiensi harus dapat diukur secara jelas. Penentuan apakah suatu kegiatan tergolong efisien atau tidak memerlukan standar sebagai tolok ukur, yang biasa disebut sebagai ukuran normal. Ukuran ini menjadi acuan awal dalam menilai tingkat efisiensi suatu aktivitas. Dalam hal ini, batas pengorbanan yang dianggap wajar adalah pengorbanan maksimal yang sebanding dengan hasil maksimal. Tanpa adanya ukuran yang dapat diukur, tidak mungkin untuk mengetahui apakah suatu kegiatan benar-benar efisien.
- Efisiensi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, yaitu keputusan dan penilaian yang bersumber dari akal sehat, masuk akal, dan logis, bukan dipengaruhi oleh emosi. Dengan pendekatan yang rasional ini, proses pengukuran dan evaluasi efisiensi dapat dilakukan secara objektif dan meminimalisasi subjektivitas.
- Dalam penerapan efisiensi, kualitas atau mutu tidak boleh dikorbankan. Meskipun peningkatan jumlah produksi diperbolehkan, mutu harus tetap dijaga dengan baik. Upaya untuk meningkatkan kuantitas tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas, karena hasil yang dicapai akan menjadi tidak optimal jika kualitasnya menurun.
- Efisiensi berkaitan dengan aspek teknis dalam pelaksanaan operasional, yang harus dilakukan seefisien mungkin. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pemborosan dan agar pelaksanaan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan. Implementasi efisiensi juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas organisasi yang bersangkutan.

Penerapan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan faktor lainnya yang dimiliki oleh perusahaan, sambil berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas tersebut. Setiap organisasi, baik itu instansi pemerintah, badan swasta, atau perusahaan, memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi sebaiknya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dimiliki, baik dari segi sumber

daya manusia, dana, maupun fasilitas yang tersedia. Sejalan dengan penelitian Fakhroh et al., (2024), penganggaran BOS akan lebih efektif dan efisien jika dikelola dengan baik mulai dari perencanaan dengan dilakukan pencatatan terlebih dahulu kemudian dilakukan pengorganisasian yang baik.

Ruang lingkup efisiensi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dianalogikan dengan efisiensi dalam dunia manufaktur yang terdiri dari tiga aspek utama: efisiensi proses, efisiensi modal kerja, dan efisiensi peralatan. Efisiensi proses menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan jam kerja dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi pasar, meliputi efisiensi jam kerja (*working hour*), efisiensi kapasitas (penggunaan kapasitas terpasang terhadap output), dan efisiensi kualitas (jumlah produk sesuai spesifikasi dibanding total produk). Efisiensi modal kerja berkaitan dengan penggunaan dana secara efektif dalam operasional, sementara efisiensi peralatan menyoroti pemanfaatan alat secara maksimal dengan biaya rendah, investasi minimal, dan tingkat kerusakan rendah. Ketiga aspek ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran.

Penilaian efisiensi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur juga relevan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat guna dan berdampak maksimal. Selisih anggaran fleksibel dalam konteks BOS dapat diartikan sebagai perbedaan antara realisasi penggunaan dana BOS dengan perencanaan anggaran yang disesuaikan berdasarkan tingkat aktivitas sekolah, seperti jumlah siswa atau program pembelajaran. Hal ini membantu mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, selisih volume penjualan dapat dianalogikan dengan selisih antara target dan realisasi capaian kegiatan atau output pendidikan, seperti jumlah siswa yang terlayani program tertentu. Jika realisasi lebih rendah dari target, maka perlu dianalisis apakah strategi penggunaan dana BOS sudah tepat. Begitu juga dengan selisih laba operasi fleksibel, dalam konteks BOS bisa menunjukkan apakah kegiatan yang didanai benar-benar berdampak positif pada hasil belajar siswa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riyanti et al., (2024), terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen dana bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap efektivitas pembelajaran, dengan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa sebagian variasi dalam efektivitas pembelajaran dapat dijelaskan oleh manajemen dana BOS, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, penerapan analisis efisiensi ini membantu sekolah menjaga akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan dana BOS.

2. Akuntabilitas

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, pihak sekolah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah dikelola. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan atau menjawab atas kinerja serta tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban (Shafratunnisa, 2015). Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang dinilai oleh orang lain berdasarkan kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, Sulfiati et al. (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan dana sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Akuntabilitas laporan keuangan di Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar tercermin dalam kesesuaian informasi keuangan yang disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku, dimana laporan yang akuntabel menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan. Pendekatan

ini tercermin dalam praktek penyusunan penggunaan keuangan yang dilengkapi dan sesuai standar akuntansi. Penyusunan penggunaan keuangan bukan hanya sekedar tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan diantara stakeholder. Menurut Soetjipto dalam Fitri (2020), pengelolaan keuangan meliputi: perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, dan pelaporan.

Pertanggungjawaban dalam manajemen keuangan sekolah, termasuk penggunaan dana BOS, dilakukan melalui rapat dewan sekolah yang melibatkan komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Hal ini harus mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan agar prinsip akuntabilitas dapat terbangun dengan baik. Surya Darma dalam Sutedjo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu transparansi pengelolaan sekolah dengan melibatkan berbagai pihak, adanya standar kinerja yang dapat diukur, serta partisipasi aktif dalam menciptakan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat. Dengan demikian, akuntabilitas dalam manajemen keuangan sekolah berarti seluruh penggunaan dana, termasuk dana BOS, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai rencana kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam penyusunan LPJ serta penerapan standar akuntansi yang relevan, entitas di Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar sudah memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan tidak hanya akurat dan dapat dipercaya, tetapi bermanfaat dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini bisa dilihat dari hasil laporan keuangan yang sudah dibuat. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas penggunaan keuangan disekolah SMK Negeri 1 Lingsar sudah diimplementasikan dengan baik dan bisa dinyatakan akuntabel karena menyusun penggunaan keuangan secara sistematis dan bisa diselesaikan tepat waktu dan sudah memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menuntut pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut Minarti (2011:225), akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain berdasarkan kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diperkuat oleh Sulfiati (2014) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan berarti penggunaan dana sekolah, termasuk dana BOS, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Miriam Budiarjo dalam Sutedi (2009:397) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada pihak yang memberikan mandat, yang dalam konteks BOS berarti pihak sekolah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada pemerintah dan masyarakat. Mahmudi (2010:81) menambahkan bahwa akuntabilitas finansial mengharuskan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dilaporkan secara jelas dalam laporan keuangan. Sejalan dengan itu, Mulyasa dalam Shafratunnisa (2014), menyatakan bahwa dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, akuntabilitas mencakup kewajiban sekolah untuk melaporkan seluruh pengeluaran dana, termasuk BOS, pada akhir tahun anggaran sebagai bentuk tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan.

3. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah

Menurut Buku Teknis Penggunaan Dana BOS 2017, ketentuan penggunaan dana BOS di sekolah mengharuskan adanya kesepakatan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan

sekolah untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Prioritas penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah, seperti biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS yang bertugas di luar kewajiban mengajar sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Dana BOS tidak boleh disimpan untuk dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, atau digunakan untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, seperti studi banding, karya wisata, serta kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau daerah. Selain itu, dana BOS juga tidak boleh digunakan untuk membeli perangkat lunak pelaporan keuangan, membiayai akomodasi kegiatan, membeli pakaian/seragam pribadi, melakukan rehabilitasi berat, atau membangun gedung baru. Dana BOS seharusnya difokuskan untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan pemberian dana BOS adalah untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, agar siswa dari keluarga miskin dapat mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang. Sejalan dengan pendapat Amini (2016), pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari manajemen keuangan sekolah yang perlu direncanakan dan dikelola dengan baik. Perencanaan yang matang sangat penting dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana di sekolah. Keberhasilan dalam menyediakan pendidikan berkualitas sangat bergantung pada perencanaan anggaran pendidikan yang solid serta pengalokasian dana yang tepat dan efektif.

Nanang Fattah dalam Sulfiati et al., (2014) menjelaskan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung, yang meliputi pengeluaran untuk pelaksanaan pengajaran seperti pembelian alat pelajaran, sarana belajar, transportasi, dan gaji guru, serta biaya tidak langsung, yang mencakup biaya kesempatan yang hilang atau *earning forgone* selama proses belajar. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus mengikuti beberapa prinsip penting, menurut Ismi Solikhatus (2016), yaitu prinsip swakelola, di mana perencanaan dan pengawasan dilakukan sendiri; prinsip partisipatif, yang melibatkan warga sekolah dan masyarakat; prinsip transparan, yang memastikan pengelolaan dana dilakukan secara terbuka; prinsip akuntabel, yang mengharuskan pertanggungjawaban penggunaan dana; prinsip demokratis, yang melibatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan; prinsip efektif dan efisien, yang mengoptimalkan mutu pendidikan; prinsip tertib administrasi dan pelaporan, yang mengharuskan laporan kegiatan dan keuangan disusun dengan baik; serta prinsip saling percaya, yang mendasari hubungan antara pemberi dan penerima dana BOS.

Penggunaan dana bantuan operasional sekolah adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) triwulan sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana Tujuan program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Peneliti bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di tiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, sejalan dengan penelitian Fauzan (2014) perlu dicari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan

KESIMPULAN

Efisiensi di SMK Negeri 1 Lingsar telah berperan positif dalam pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari upaya peningkatan pengetahuan, pelatihan yang dilakukan secara rutin, serta penanaman sikap yang sejalan dengan visi organisasi. Semua ini turut mendukung tercapainya pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif.

Akuntabilitas dalam penggunaan keuangan di SMK Negeri 1 Lingsar tergolong cukup baik, meskipun belum maksimal. Kendati belum sepenuhnya optimal, keberadaan struktur organisasi yang teratur serta pelaksanaan pengendalian sesuai kebutuhan menunjukkan adanya komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan ke depannya.

Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Lingsar sudah cukup tepat dan mendukung penyediaan fasilitas sekolah. Dengan struktur organisasi yang jelas dari pemerintah, pengelolaan dana dilakukan sesuai kebutuhan sekolah. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dan tanggung jawab dalam penggunaan dana BOS untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di masa mendatang.

Untuk meningkatkan efisiensi, perlu fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, pelatihan rutin teknologi, serta pengembangan kompetensi SDM yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas keuangan sekolah perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, serta memastikan transparansi, kepercayaan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, guna mendukung transparansi dan keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, N. S. (2016). "Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri Jumapola." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Edisi 6, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Fakhroh, E. Z., Budi, I. S., & Kholik, A. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN Kowel 3 Pamekasan. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(2), 873-887.
- Fauzan, F. (2014). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap perilaku etis dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10(3), 158-169.
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33-39.
- Mahmudi, A. (2010). *Pengaruh Pembelajaran dengan strategi MHM berbasis masalah terhadap Kemampuan berpikir Kreatif, kemampuan Pemecahan masalah, dan Disposisi matematis, serta persepsi terhadap Kreativitas* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Minarti, S. (2011). Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MI Roudlotus Salam. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*.

Renstra Depdiknas (2005). Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional (Renstra Depdiknas). 2005-2009, Retrieved July 5, 2025 from <http://www.depdiknas.go.id/renstra/ind>

Riyanti, T., & Nugraha, M. S. (2024). Pengaruh Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Efisiensi Pembelajaran. *Expectation: Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 34-45.

Shafratunnisa, F. (2015). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir.

Solikhatun, Ismi. (2016) Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Sulfiati, F., Alam, A. S., & Irwan, A. L. (2010). Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 113-122.

Sutedi, Adrian. (2009). Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedjo, S. (2009). *Persepsi stakeholders terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Syamsi, I. (2010). Membuka peluang berwirausaha untuk pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(7), 90-103.

Victoria, T. (2014). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Di SMK Muhammadiyah Prambanan. *Jurnal Pendidikan Teknik Mekatronika*, 5(4).